

Kesimpulan Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Dukun Santet

KORAN TEMPO — 17 JANUARI 1999.

Orang-orang yang dituding dukun santet adalah guru agama, mantri, dan tokoh masyarakat.

TEMPO/M. TAUFAN RENGGANIS



Komisiner Komnas HAM, Choirul Anam (kanan) dan Beka Ulung Hapsara, di kantor Komnas HAM, Jakarta, 10 Januari lalu.

Rezki Alvionitasari

rezki.alvionitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan bukti dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus pembunuhan dukun santet di sejumlah daerah di Jawa Timur. Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa kasus yang terjadi pada 1998 itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Tindakan kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang ditujukan langsung ke penduduk sipil," kata Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999, Beka Ulung Hapsara, di kantor Komnas HAM, Selasa lalu.

Kasus pembantaian terhadap ratusan orang yang dituduh sebagai dukun santet terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Malang. Komnas HAM mencatat sebanyak 194 orang dibunuh di

"Kami memastikan adanya telegram. Ada yang memaknai lain, tapi bagi kami telegram menjadi bagian yang paling penting dalam pembantaian dukun santet 1998-1999."

Choirul Anam
Komisiner Komnas HAM

Banyuwangi, 108 orang di Jember, dan 7 orang di Malang. Kebanyakan korban mengalami penganiayaan sebelum dibunuh.

Peristiwa itu berlangsung bertepatan dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie. Ketika itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik memerintahkan aparat mendata dan melindungi orang-orang yang diduga punya kemampuan supranatural. Namun data tersebut kemudian bocor, yang selanjutnya diduga memicu munculnya pembantaian terhadap warga yang dicurigai sebagai dukun santet.

Setelah didata kebanyakan korban yang dibunuh itu adalah guru agama, mantri, hingga tokoh masyarakat setempat. Sejumlah korban selamat menuturkan pelaku menggunakan penutup kepala seperti ninja.

Komisiner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan Tim Ad Hoc Komnas HAM telah memeriksa para korban, keluarga korban, serta aktor dari kalangan tentara maupun sipil. Mereka juga mengumpulkan informasi dari catatan media jurnalis.

"Kami memastikan adanya telegram. Ada yang memaknai lain, tapi bagi kami telegram menjadi bagian yang paling penting dalam pembantaian dukun santet 1998-1999," ujar Anam di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Tim Ad Hoc Komnas HAM juga menemukan bukti bahwa pembunuhan itu dilakukan secara sistematis. Salah satu indikatornya, ada kesamaan metode pembunuhan terhadap para korban. Unsur sistematis juga tampak dari adanya pengkondisian aparat sehingga mereka lamban bergerak untuk mencegah pembunuhan.

Komnas HAM telah mengirim berkas penyelidikan itu ke Kejaksaan Agung pada November lalu. Selain itu, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo serta Dewan Perwakilan Rakyat mendukung penuh upaya pemulihan korban. "Kami meminta Presiden menyampaikan permintaan maaf kepada para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang telah terjadi," ujar Beka.

● A.JI NUGROHO

Temuan dan Rekomendasi

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet Tahun 1998-1999 menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan kemanusiaan.

Waktu kejadian

Periode 1998-1999

Tempat

Wilayah Jawa Timur, di antaranya Banyuwangi, Jember, dan Malang.

Korban

- » Beberapa warga sipil yang dituduh memiliki kemampuan lebih atau kesaktian seperti orang yang bisa menyembuhkan atau sebagai dukun.
- » Orang yang memiliki posisi atau pengaruh khusus di masyarakat.

Pelaku

Tim menduga ada aktor yang melakukan propaganda, menggagalkan massa pembunuhan, dan penganiayaan.

Bentuk pelanggaran HAM berat

- » Tim menemukan pola pembunuhan, yaitu berdiri sendiri, pembunuhan disertai perusakan, dan pembunuhan disertai tindakan lain.
- » Para saksi menerangkan, korban mengalami penganiayaan dulu yang sebagian besar berakibat pada kematian.

Sebaran korban

- » Banyuwangi 194 orang
- » Jember 108 orang
- » Malang 7 orang.

TEMPO/GATOT SRIWIDODO



Protes mahasiswa untuk pengusutan tuntas kasus Banyuwangi di Jakarta, pada 1998.

Rekomendasi untuk presiden

- » Mendukung dan memberi komitmen penuh terhadap upaya pemulihan korban.
- » Menyampaikan permintaan maaf kepada para korban.
- » Menetapkan secara khusus perencanaan program nasional pemulihan.
- » Memerintahkan segenap kementerian maupun instansi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kemampuan finansial, prosedural, dan administratif yang dimiliki untuk mendukung upaya pemulihan korban.

Rekomendasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat

- » Mendukung dan memberikan komitmen penuh terhadap upaya pemulihan korban.
- » Memastikan pengalokasian anggaran dan program pemulihan korban.

SUMBER: KOMNAS HAM

● REZKI ALVIONITASARI